



Konflik Laut China Selatan Serta Dampaknya Atas Hubungan Sipil Militer di Asia Tenggara

Yusa Djuyandi ¹⁾, Adilla Qaia Illahi²⁾, Adinda Corah Habsyah Aureli³⁾

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

yusa.djuyandi@unpad.ac.id¹⁾
Adilla18002@mail.unpad.ac.id²⁾
Adinda18008@mail.unpad.ac.id³⁾

Abstrak

Ketegangan dan konflik di Laut China Selatan juga tidak hanya terjadi diantara beberapa negara ASEAN yang batas lautnya saling berhimpitan, tetapi juga terjadi dengan China yang turut mengklaim wilayah Laut China Selatan dan Amerika Serikat yang turut memiliki kepentingan ekonomi dan politik atas wilayah ini. Potensi konflik terbuka telah mendorong negara-negara untuk mengoptimalkan hubungan sipil-militer negaranya dalam menjaga kedaulatan laut. Pengumpulan data dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber yang relevan dan berkaitan serta memiliki jangka waktu yang kontemporer dengan penelitian. Hasil penelitian ini melihat bahwa konflik di Laut China Selatan ini tidak lepas dari peran sipil dan juga militer yang masuk terhadap ranah negara-negara Asia Tenggara yang bersengketa, dimana setiap aspek hubungan antara negara khususnya hubungan sipil dan militer menjadi penentu dimana suatu negara dapat menjadikan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi arah dari konflik yang terjadi di Laut China Selatan ini.

Kata Kunci: Laut China Selatan, Konflik, Hubungan Sipil-Militer, Asia Tenggara.

Abstract

Tensions and conflicts in the South China Sea also occur not only between several ASEAN countries whose maritime boundaries coincide, but also with China taking part in claiming the South China Sea region and the United States which also has economic and political interests in this region. The potential for open conflict has prompted countries to optimize their civil-military relations in safeguarding maritime sovereignty. Data collection and methods used in this research are qualitative methods by studying literature from various sources that are relevant and related and have a contemporary period of time. The results of this study see that the conflict in the South China Sea cannot be separated from the role of civilians and also the military that enter the realm of disputing Southeast Asian countries, where every aspect of the relationship between countries, especially civil and military relations, determines where a country can make a policies that can influence the direction of the conflict in the South China Sea..

Key Words: South China Sea, Conflict, Civil-Military Relations, Southeast Asia.

PENDAHULUAN

Laut China Selatan dewasa ini telah menjadi diskusi strategis di dunia. Laut China Selatan sendiri merupakan sebuah perairan yang dianggap sangat potensial sebab di dalamnya terkandung gas alam dan minyak bumi, serta sebagai jalur



pelayaran, perdagangan dan minyak dunia. Dengan daratan dan perairan yang meliputi gugusan kepulauan besar, sejarah penguasaannya silih berganti oleh negara-negara sekitarnya. Dewasa ini, beberapa negara seperti Taiwan, China, Brunei, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. terlibat dalam upaya saling klaim wilayah ini, bahkan dampak dari pada klaim tersebut adalah adanya pelanggaran beberapa kapal patroli negara Vietnam, Malaysia dan China terhadap batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Laut China Selatan merupakan wilayah maritime dengan potensi kekayaan laut yang cukup besar, baik itu dari sisi hasil perikanan laut maupun tambang *offshore* (Castro, 2015; Glaser 2015). China melalui risetnya mengungkapkan adanya suatu perasaan optimis berkenaan dengan terdapatnya cadangan minyak lebih dari 213 miliar barel atau 10 kali lipat dari cadangan milik Amerika Serikat (Roza, Nainggolan, & Muhammad, 2013). Adapun *Energy information Administration* atau EIA milik Amerika menginformasikan bahwa cadangan terbesar di wilayah tersebut berasal dari gas alam yang sama dengan cadangan minyak milik Qatar dengan perhitungan sekitar 900 triliun kaki kubik (Roza, Nainggolan, & Muhammad, 2013).

Tidak hanya dari sisi kekayaan lautnya. Aktivitas pelayaran yang menggunakan jalur Laut China Selatan meningkat, peningkatan ini turut serta mendorong perkembangan ekonomi yang dinamis di negara sekitar kawasan perairan tersebut, tetapi kondisi ini menjadi alasan lain atas menguatnya konfrontasi antar negara-negara di sekitar wilayah LCS. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, khususnya China, membuat banyak negara berupaya keras untuk mendapat kontrol atas kawasan perairan tersebut. Dalam hal ini China maupun Amerika Serikat melakukan upaya pengamanan kepentingan melalui jalur resmi atau tidak resmi demi mencegah ofensif serta provokasi kekuatan bersenjata. Namun belakangan hal ini dilanggar untuk unjuk kekuatan bahkan ada negara yang menggunakan intimidasi serta ancaman dengan menggunakan kekuatan militer (Cronin, 2015).

Konflik antar negara di dalam wilayah LCS dapat dilihat dari berbagai perspektif kepentingan dari actor-aktor negara yang terlibat dalam konfrontasi ini, baik itu karena masalah kedaulatan wilayah, kepentingan ekonomi ataupun bahkan politik. Melalui pendekatan rasional, negara berusaha mempertahankan maupun mengejar kepentingannya, dalam hal ini khususnya hal-hal potensial. Apabila kepentingan-kepentingan ini tidak mampu diharmonisasikan maka akan menimbulkan perang. Demikian pula dalam pengambilan keputusan, distribusi wewenang dan kekuatan dalam pengambilan keputusan ini perlu dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan wilayah.

Konflik terbuka perihal kawasan Laut China Selatan telah terjadi semenjak tahun 1970-an. Hal ini terjadi karena kontrol penguasa yang silih berganti di wilayah tersebut dan dampaknya terlihat pada perubahan nama kawasan perairan itu. Pada 1988, Angkatan Laut RRC dan Vietnam kembali terlibat dalam konfrontasi wilayah Laut China Selatan yang mengakibatkan Vietnam kehilangan 70 personel militer (Roza, Nainggolan, & Muhammad, 2013).

Eskalasi ketegangan yang ditimbulkan perubahan lingkungan strategis di wilayah perairan Laut China Selatan yang diperebutkan negara-negara sekitarnya semakin tinggi. Indonesia yang awalnya tidak terlibat sebagai salah satu aktivitas konfrontasi



tersebut mulai terjerumus sejak China (Republik Rakyat Tiongkok) mengklaim mutlak atas perairan Laut China Selatan pada 2012 (Rosasians, 2013).

Konflik yang terus terjadi dan berpotensi untuk berkembang di wilayah Laut China Selatan telah mendorong beberapa negara untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka pengamanan kepentingan atas klaim wilayah mereka, salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan strategi hubungan sipil-militer. China menjadi salah satu negara yang turut serta menggunakan pendekatan konvergensi sipil-militer dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya dalam urusan Laut China Selatan (You, 2015).

Costlow (2012) juga telah melihat suatu upaya yang berkenaan dengan bagaimana negara-negara di sekitar Laut China Selatan dalam mengandalkan badan-badan sipil mereka, meskipun bersenjata, untuk menegakkan hukum dan ketertiban di laut dan mempertahankan klaim kedaulatan atas wilayah-wilayah maritim yang disengketakan. Dengan melibatkan badan-badan sipil, negara-negara menempuh jalan yang jauh lebih tidak konfrontatif daripada yang mungkin mereka lakukan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis konflik Laut China Selatan serta dampaknya atas hubungan sipil militer di Asia Tenggara.

Penelitian yang menganalisis tentang konflik Laut China Selatan serta dampaknya atas hubungan sipil militer di Asia Tenggara merupakan suatu hal yang baru dan belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan, kajian yang memiliki kedekatan dengan riset ini adalah tentang Strategi Sipil-Militer China untuk Pengendalian Sengketa Laut China Selatan yang dilakukan oleh You (2015), beberapa riset lainnya hanya melihat bagaimana hubungan-sipil militer diberdayakan untuk menjaga kesatuan atau keamanan negara (Budisantoso, 1999; Gibson dan Snider, 1999), dan riset lainnya lebih mendalami tentang kekuatan militer masing-masing negara dalam persoalan keamanan maritime di Laut China Selatan (Snyder, 2004; Rosenberg & Chung, 2008).

Dalam menganalisis konflik Laut China Selatan serta dampaknya atas hubungan sipil militer di Asia Tenggara, penelitian ini menggunakan teori kontrol sipil atas militer, teori ini dianggap lebih sesuai karena berkenaan dengan pola hubungan sipil-militer yang demokratis.

Teori yang digunakan dalam pembahasan jurnal ini adalah teori kontrol sipil atas militer yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington. Ia mengungkapkan bahwa ada dua jenis kontrol dalam hubungan sipil militer yaitu kontrol sipil objektif (*Objective Civilian Control*) dan kontrol sipil subjektif (*Subjective Civilian Control*).

Kontrol sipil objektif berarti menjunjung tinggi profesionalitas militer dan mendapatkan pengakuan dari pejabat-pejabat negara. Hal ini mencegah intervensi militer dalam politik dan mencegah politik mencampuri urusan militer. Kontrol ini juga memberikan batasan tugas-tugas militer dalam negara agar tidak keluar dari tugas-tugasnya.

Ada dua tingkatan yang dapat memaksimalkan profesionalisme militer dalam kontrol sipil militer, yaitu tingkatan kuasa dan tingkatan ideologi. Menurut Huntington (1984) tingkatan kuasa terbagi menjadi dua yaitu formal dan informal. Jika otoritas itu semakin tinggi



Kontrol selanjutnya adalah kontrol sipil subjektif dimana kontrol ini memaksimalkan kekuasaan sipil untuk mengontrol militer. Dengan kata lain, kontrol ini benar-benar meminimalkan intervensi militer dalam ranah politik. Kontrol ini juga dapat memaksimalkan kontrol sipil akan militer dengan menjadikan militer sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sipil.

Kontrol sipil subjektif pun juga terbagi menjadi tiga bentuk yaitu kontrol sipil berdasarkan kelas sosial (*civilian control by class*), kontrol sipil berdasarkan institusi pemerintah (*civilian control by government institution*), dan kontrol sipil berdasarkan konstitusi (*civilian control by constitution form*).

Pertama adalah kontrol sipil berdasarkan kelas yang biasanya berbentuk kelas borjuasi, aristokrat dan kelas borjuis liberal. Kelas-kelas ini ada pada era abad kegelapan sampai abad pencerahan di mana kelompok-kelompok ini menguasai ekonomi dan birokrasi saat itu. Kedua adalah kontrol sipil berdasarkan institusi pemerintah. Kontrol ini memaksimalkan institusi pemerintah seperti monarki absolut. Dalam pemerintahan monarki absolut, dipimpin oleh sipil yang memiliki kekuasaan secara keturunan. Dan yang terakhir adalah kontrol sipil berdasarkan konstitusi. Kontrol ini dilakukan melalui pembentukan konstitusi atau hukum dari negara tersebut. Pembuatan hukum ini juga disetujui oleh pemerintah negara tersebut. Jika otoritas itu semakin tinggi maka semakin kuat persatuan di dalam strukturnya dan semakin kuat pula kuasanya. Tingkatan ini berhubungan dengan hierarki di pemerintahan antara sipil dan militer. Siapa yang menempati hierarki otoritas lebih tinggi maka dapat mengontrol yang menempati hierarki di bawahnya. Sedangkan dalam kekuasaan informal, ada empat hal yang perlu digarisbawahi. Pertama adalah afiliasi kelompok sipil, perwira dan militer.

Selanjutnya adalah tingkatan ideologi di mana ideologi mayoritas mempengaruhi ideologi minoritas. Mempengaruhi di sini adalah dengan ideologi mayoritas mempunyai kuasa untuk mengatur ideologi minoritas di suatu wilayah. Ideologi mayoritas juga dapat mempengaruhi pemerintahan negara tersebut.

Pretorianisme dijelaskan oleh Huntington dalam bukunya yang berjudul *Political Order in Changing Societies*. Menurutnya Pretorian Society adalah negara-negara yang dipimpin oleh militer tetapi negara ini tetap harus tunduk pada sipil. Huntington dalam buku ini tidak menjelaskan secara rinci dan hanya membahas pembahasan teoritis saja. Hingga Perlmutter mengkritisi dan melengkapi pembahasan Huntington sebelumnya dalam buku *Egypt: The Praetorian State, The Military and Politics in Modern Times, dan The Political of The Military*.

Perlmutter (1984) beranggapan bahwa pretorian ini berkaitan dengan profesionalisme militer dan kecenderungan intervensi dalam ranah politik. Dengan profesionalisme militer tersebut, pihak militer merasa bertanggung jawab akan beberapa hal eksternal sehingga membuat profesionalisme itu memasuki ranah politik.

Mudahnya, intervensi militer dalam ranah politik disebut Pretorianisme. Hal ini dapat terlihat ketika orang-orang militer menunjukkan dirinya sebagai actor politik di hadapan public. Selanjutnya, orang-orang militer ini tampak dominan dalam politik sehingga dapat menggunakan kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu. Walaupun pretorianisme memiliki perbedaan satu sama lain dengan melihat tingkat campur tangan militer dalam politik, tujuan mereka tetap sama yaitu untuk membawa dan menjaga kepentingan militer di tatanan negara.



Pretorian sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu: moderator pretorian, pengawal pretorian, dan pemerintah pretorian. Moderator pretorian ini bertindak sebagai pengawas dalam berjalannya roda pemerintahan. Militer di sini tidak terjun langsung dalam pemerintahan tetapi mengawasi sipil yang menjalankan pemerintahan. Militer juga berhak melakukan kudeta jika pemerintahan yang dipimpin oleh sipil ini tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Yang kedua adalah pengawal pretorian. Bentuk pretorianisme ini dapat mengambil alih pemerintahan jika pemerintahan dianggap tidak berhasil dalam menjalankan tugasnya. Militer yang mempunyai kekuasaan di sini langsung mengambil alih kekuasaan dan memegang kekuasaan untuk beberapa waktu hingga jalannya pemerintahan sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Pengawal pretorian juga beranggapan bahwa pemerintahan dan tujuan negara akan tercapai bila militer yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan.

Terakhir adalah pemerintah pretorian. Bentuk ini adalah bentuk yang memiliki intervensi militer yang tinggi dalam pemerintahan. Pada dasarnya bentuk ini mempunyai dominasi yang kuat dalam pemerintahan dan juga menguasai bidang-bidang lainnya yang ada di negara melalui struktur yang diisi oleh militer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode ini dianggap lebih tepat digunakan untuk menganalisis dengan lebih mendalam fenomena konflik di Laut China Selatan dan dampaknya atas hubungan sipil dan militer di Asia Tenggara. Sumber data daripada riset ini adalah studi literatur, dimana data-data diperoleh dari buku, jurnal dan juga laporan-laporan yang mengungkapkan tentang persoalan atau konflik di Laut China Selatan serta hubungan sipil-militer yang dibangun oleh negara-negara dalam memperkuat kedaulatan wilayahnya di perairan Laut China Selatan.

Untuk validasi data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu beberapa sumber data kami bandingkan untuk memperoleh informasi yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepentingan Negara-Negara yang Berkonflik dalam Permasalahan Laut China Selatan

Dalam sebuah konflik yang terjadi, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara yang terlibat pasti memiliki kepentingannya masing-masing. Seperti pada konflik yang terjadi di wilayah Laut China Selatan, bahwa semua negara yang terlibat di dalamnya memiliki kepentingannya masing-masing yang ingin diwujudkan agar negara tersebut mendapatkan keuntungan dari konflik yang terjadi. Dalam konflik di wilayah perairan Laut China Selatan dan Indonesia terlibat di dalamnya, terdapat kepentingan juga yang ingin diwujudkan oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa setiap negara pasti memiliki tujuannya masing-masing dalam segala sesuatu yang dilakukan. Terlebih lagi jika dalam melakukan hal tersebut sudah dikeluarkan dana yang jumlahnya tidak sedikit.

Bagi Indonesia sendiri, sangat sulit dielakkan dan menolak fakta bahwa memang wilayah perairan Laut China Selatan memiliki banyak manfaat dan bermakna penting bagi kehidupan di Indonesia. Salah satu makna penting dari wilayah perairan Laut China Selatan terhadap kehidupan di Indonesia adalah pada bidang ekonomi. Meskipun sebenarnya Indonesia tidak ikut melakukan klaim terhadap wilayah perairan Laut China



Selatan, tetapi sebagai salah satu negara terbesar di ASEAN, Indonesia dirasa perlu ikut serta dalam upaya diplomasi untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah perairan Laut China Selatan.

Dampak ekonomi yang dapat dirasakan oleh Indonesia akibat konflik yang terjadi di wilayah perairan Laut China Selatan adalah pada sektor ekspor dan impor berbagai barang kebutuhan di Indonesia. Karena wilayah perairan Laut China Selatan merupakan pintu masuk utara jalur ekspor dan impor yang mengarah ke Indonesia. Dan jika di wilayah perairan Laut China Selatan tersebut terjadi konflik, pasti akan ada pembatasan wilayah sehingga kapal-kapal yang berguna mengangkut barang ekspor dan impor dari dan ke Indonesia akan kesulitan untuk melewati wilayah tersebut. Dan pada akhirnya sudah bisa dipastikan bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia yang mengandalkan proses ekspor dan impor akan mengalami gangguan.

Disebutkan bahwa wilayah perairan Laut China Selatan menjadi jalur perdagangan ekspor dan impor ke Indonesia dengan nilai ekonomi mencapai US\$5 triliun dan jumlah tersebut merupakan lima kali lipat nilai dari GDP di Indonesia. Sehingga apabila wilayah perairan Laut China Selatan mengalami pembatasan wilayah tentu akan berdampak pada jalur perdagangan ekspor dan impor. Hal tersebut sudah pasti akan menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia, bahkan tidak hanya kerugian di bidang ekonomi saja, tetapi bisa saja kerugian di bidang lainnya yang bersumber dari kegiatan perekonomian ekspor dan impor.

Selain itu, ketika wilayah laut China Selatan jatuh ke tangan China, pihak pemerintah khawatir hal tersebut akan berpengaruh kepada jatuhnya juga wilayah Natuna ke pihak China. Karena sama seperti wilayah perairan Laut China Selatan, wilayah perairan Natuna juga menjadi salah satu wilayah yang menjadi perebutan oleh negara China. Tentu hal tersebut tidak dikehendaki oleh pihak pemerintah Indonesia, dikarenakan wilayah Natuna bisa digolongkan menjadi salah satu wilayah aset perairan di Indonesia. Hal tersebut karena wilayah Natuna menyimpan banyak kekayaan sumber daya alam, dan ketika wilayah tersebut diambil alih, akan berpengaruh juga terhadap kehidupan masyarakat sipil sekitaran wilayah Natuna yang banyak menggantungkan hidupnya dengan mencari sumber daya yang ada di wilayah Natuna tersebut.

Sehingga salah satu cara menghindari hal tersebut adalah dengan menjadi tuan rumah berbagai lokakarya pembahasan perselisihan yang terjadi di wilayah Laut China Selatan. Dengan begitu diharapkan bahwa Indonesia menjadi negara netral yang akhirnya tidak akan ada musuh yang tidak menyukai Indonesia. Terbukti bahwa dengan menjadi tuan rumah lokakarya pembahasan wilayah Laut China Selatan, Indonesia menjadi memiliki hubungan dengan negara Amerika. Bahkan dengan kedekatan tersebut, militer Indonesia dapat melakukan pelatihan bersama dengan militer Amerika. Ketika kita melihat secara awam, tentu hal tersebut bisa merupakan hal yang baik agar terjalin hubungan yang baik antar kedua militer negara. Tetapi di sisi lain bisa diketahui kepentingan tersembunyi, yaitu dengan latihan bersama menjadikan militer Indonesia dapat melihat dan mengukur kekuatan yang dimiliki oleh militer Amerika.

Pada dasarnya Indonesia ikut serta dalam penyelesaian konflik hanya untuk berperan aktif dan turut serta dalam perdamaian dunia. Namun selain itu Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menjaga wilayah kedaulatan negaranya yaitu wilayah perairan natuna yang berseberangan dengan wilayah perairan Laut China Selatan. Karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa jika keadaan wilayah Laut China Selatan



memanas tentu akan berdampak juga pada wilayah perairan natuna yang jaraknya cukup dekat.

Selain negara Indonesia yang terlibat dan memiliki kepentingan terhadap konflik wilayah perairan Laut China Selatan, terdapat juga negara yang memiliki kepentingan terhadap konflik tersebut. Salah satunya adalah negara Adidaya atau *Super Power* Amerika Serikat. Setelah adanya konflik tersebut, Amerika turut serta menjadi jembatan dalam berbagai dialog antar negara yang berselisih mengenai perebutan wilayah Laut China Selatan tersebut. Meskipun Amerika Serikat tidak memiliki singgungan wilayah dengan wilayah Laut China Selatan, tetapi mereka merasa perlu ikut serta menjaga kestabilan keamanan di dunia karena mereka merupakan negara Adidaya. Namun banyak juga yang menganggap bahwa sebenarnya Amerika memiliki kepentingan tersembunyi di balik langkah yang diambil terhadap konflik tersebut.

Jika dilihat keadaan saat ini, China menjadi salah satu negara yang kuat di wilayah Asia Tenggara. Dan ada kemungkinan bahwa jika China mendapatkan wilayah Laut China Selatan, pertahanan keamanan mereka dalam bidang militer laut akan semakin kuat. Hal tersebut tentu akan membuat Amerika terancam dari kedudukannya sebagai negara *Super Power* atau Adidaya. Sehingga dibalik langkahnya sebagai mediator, sebenarnya Amerika tidak ingin wilayah Laut China Selatan jatuh kepada kekuasaan China. Karena ketika China mendapatkan wilayah perairan Laut China Selatan dan membangun pangkalan militer di wilayah tersebut, kekuatan militer China akan bertambah dan menyebabkan banyak negara yang awalnya bersekutu dengan Amerika berpindah haluan memilih untuk bersekutu dengan China.

Keterkaitan Sipil dan Militer Dalam Konflik Laut China Selatan

Dalam sebuah permasalahan yang terjadi pada Laut China Selatan tidak terlepas dari peran suatu negara dalam mengkondisikan masyarakat sipilnya yang berada dekat dengan Kawasan tersebut dan juga aspek militer dalam pengawasan keamanan bagi setiap negara. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan negara-negara tetangga dimana Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei dan Vietnam merasakan dampak langsung dari adanya konflik di Laut China Selatan, terutama yang berkenaan dengan klaim China atas *Nine Dash Line*. Sektor yang kemudian terdampak dari adanya konflik ini adalah sektor maritime, dimana didalamnya bukan hanya ada unsur kepentingan pertahanan (militer) tetapi juga masyarakat sipil (nelayan atau masyarakat pesisir).

Adanya konflik yang berkenaan dengan batas wilayah laut negara di Laut China Selatan telah mendorong perlu adanya peran serta bersama antara sipil dan militer dalam menjaga wilayah laut, sebagaimana misalnya patroli Angkatan Laut dapat menerima informasi yang diberikan oleh para nelayan yang sedang melaut terkait dengan pelanggaran batas wilayah eksplorasi hasil laut oleh kapal nelayan asing yang dilindungi oleh kapal patroli negara mereka. Adanya peran serta bersama merupakan bentuk dari sinergitas sipil dan militer, dimana tujuannya melindungi kedaulatan negara dan mata pencaharian nelayan di dalam wilayah atau teritori laut nasional.

Bagi Indonesia sendiri, upaya melindungi batas wilayah dan kekayaan wilayah lautnya sudah menjadi hal yang mutlak diperlukan. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta berdasarkan penelusuran Tim Riset CNBC (Citradi, 2020) bahwa di Laut China Selatan yang masih masuk dalam teritori wilayah Indonesia (Laut



Natuna) terdapat kekayaan perikanan (dalam ribu ton/tahun) dimulai dengan ikan pelagis kecil sebanyak 621,5, ikan karang sebanyak 21,7 lalu demersal sebanyak 334,8 lalu cumi-cumi 2,7 lalu ikan pelagis besar sebanyak 66,1 dan lobster sebanyak 500 ton/tahun.

Kekayaan laut tersebut telah mendorong banyak kapal nelayan asing dari negara tetangga untuk masuk ke dalam kawasan laut Natuna, persoalan muncul ketika kapal nelayan Indonesia yang masih berada dalam wilayah perairan nasional justeru harus bertemu dengan kapal nelayan asing yang diproteksi oleh kapal patroli negaranya. Pada posisi adanya persinggungan ini maka seringkali menimbulkan ketegangan dan masalah antar negara.

Lalu adapun keterkaitan sipil dan militer dalam menanggapi konflik laut china selatan ini dimana aspek politik dari suatu negara yang digerakan oleh pemerintahan yaitu sipil dapat mempengaruhi suatu hubungan antara negara yang mengikutsertakan militer dalam menanggapi konflik yang terjadi di Laut China Selatan ini. Dengan menggunakan teori diplomasi pertahanan dimana Saragih (2018) mengungkapkan bahwa diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor negara saja (seperti politisi, kekuatan bersenjata atau badan intelijen), namun juga organisasi non-pemerintah, think tank dan masyarakat sipil. Inilah yang membedakannya dengan diplomasi militer, dimana diplomasi militer fokus hanya pada penggunaan kekuatan militer dalam diplomasi terkait isu-isu keamanan saja. Diplomasi pertahanan bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar negara melalui jalur-jalur formal maupun informal, dengan pemerintah maupun non-pemerintah dan dengan resiko dan biaya rendah. Keterkaitan tersebut mendorong suatu hubungan agar penyelesaian konflik ini dapat diatasi dengan tidak adanya suatu konflik yang mengarah menuju pertikaian dimana hal tersebut dapat mempengaruhi keadaan di Asia Tenggara dan juga suatu hubungan sipil dan militer.

Hubungan sipil dan militer ini pun masuk kepada suatu kebijakan dari setiap pertahanan negara yang dipengaruhi konflik laut china selatan. Mengutip dari Purwanto (2010) Dalam teori Models of Military Expenditures yang dikemukakan oleh R.P Smith, pengeluaran atau peningkatan belanja militer sangat ditentukan oleh karakter proses pembuat kebijakan suatu negara dan relevansi militer yang mempunyai keterkaitan pengaruh ekonomi dan politik dalam ruang lingkup domestik, kawasan dan internasional atau global. Dimulai dengan negara China dimana pada kenyataannya bahwa negara ini meningkatkan anggaran belanja negara dalam bidang militer (*armed forces*), kekuatan penjagaan perdamaian (*peacekeeping*). Hal tersebut mengaitkan kepentingan sipil dan juga militer dalam permasalahan di China selatan, seperti kepulauan Spratly dimana disana terdapat klaim China dalam menduduki pulau tersebut, dan dibangunnya suatu komoditas untuk warga dan juga pangkalan militer dengan letak kepulauan tersebut yang dibidang strategis dan juga masuk ke dalam daerah laut china selatan dimana terdapat banyak sengketa yang terjadi dengan negara lain tentang kepulauan yang strategis tersebut.

Dampak Permasalahan Laut China Selatan Terhadap Sipil dan Militer di Negara-negara Asia Tenggara

Dampak yang dipengaruhi dari konflik di Laut China Selatan ini sebenarnya lebih masuk terhadap ranah Internasional dan juga negara yang berada di Kawasan Asia



Tenggara dimana permasalahan tersebut merupakan akar ketegangan antar negara walaupun setiap negara memiliki caranya masing-masing dalam menanggapi konflik tersebut agar hubungan antar negara dapat berjalan dengan motif ekonomi, politik dan sosial bagi setiap negara. Dampak terhadap militer dititik beratkan terhadap pengawasan lebih dan juga alutsista militer setiap negara di bagian udara dan juga maritim untuk mengontrol setiap aktivitas pertahanan negara terutama di laut china selatan yang menjadi daerah konflik. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa anggaran belanja militer yang meningkat mempengaruhi hubungan militer dan sipil antar negara agar bersinergi untuk menanggapi konflik di daerah tersebut, dimana peran yang dimiliki oleh bidang sipil dan militer berbeda. Dan dalam ranah Internasional masuk terhadap dampak pada negara-negara superior seperti Amerika yang masuk terhadap permasalahan laut china selatan melalui badan Internasional ataupun pengaruh negara yang merupakan dampak dari konflik Laut China Selatan ini.

Lalu adapun dampak terhadap warga sipil yang bermukim di dekat dengan jalur konflik china selatan ini dimana adanya ketegangan jika nelayan dalam kawasan ZEE bertemu dengan patrol militer dari negara lain yang masuk pada zona konflik yang bisa berakibat buruk seperti pengusiran di daerah yang sebenarnya sampai sekarang belum ada penyelesaiannya, hal ini juga termasuk dengan kapal nelayan asing yang menerobos masuk perbatasan negara lain karena dampak yang terjadi dari konflik ini dengan hukum dan juga penetapan yang simpang siur, ditambah dengan adanya permasalahan negara china mengirim kapal nelayan yang dijaga oleh kapal militer masuk kedalam area negara Indonesia yang menjadi polemik, dampak seperti ini menghubungkan bahwa sipil dan militer masuk kedalam pengaruh konflik ini, karena aspek tersebut militer yang menjadi alat bagi negara dan juga sipil yang menjadi perwakilan dari sebuah negara menjadi penentu dalam konflik yang terjadi di laut china selatan ini.

Peran Sipil Militer Negara Lain

Berbagai negara mengklaim wilayah Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayah mereka termasuk yang terlibat di dalamnya Negara Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam atau negara yang tergabung dengan ASEAN dan juga China dengan klaim wilayah maritim yang luas terkandung berbagai sumber daya alam yang melimpah dan juga teritorial yang mana konflik ini berpotensi untuk menghadirkan bentrokan antar negara sehingga setiap bagian dari negaranya mempersiapkan langkah preventif untuk menjaga batas wilayahnya dengan persiapan militer yang memadai dan juga sebagai ajang dalam menunjukkan siapa yang memiliki daya dan strategi serta koordinasi pertahanan paling kuat. Masalah mengenai Laut China Selatan merupakan sorotan utama dalam perbincangan skala internasional dalam kurun beberapa waktu sekarang ini yang mana melibatkan beberapa wilayah yang berada pada regional Asia Tenggara serta negara sekutu lainnya. Beberapa tindakan yang memicu terjadinya hal tersebut adalah mengenai pembangunan dan pengembangan dalam sektor infrastruktur dan kaitannya dengan ekonomi serta daya teknologi yang mumpuni dan canggih demi meningkatkan keamanan juga meningkatkan daya saing global dengan negara lainnya khususnya yang dibangun oleh Negara China, tetapi pembangunan yang dilaksanakan terjadi di wilayah dengan status sengketa sehingga menimbulkan banyak kecaman dari berbagai negara dan pihak berkepentingan, adapun permasalahan mengenai sengketa



ini bukan hanya terjadi karena permasalahan mengenai pembangunan infrastruktur dan ekonomi dari klaim negara – negara di sekitarnya namun juga mengenai kompetisi dan ajang dari berbagai negara yang bersitegang dan ikut campur mengenai pertentangan ideologi dari setiap negara tersebut.

Hal tersebut juga berkaitan dengan diplomasi antar negara dan siapa yang menjadi sekutu diantara negara yang berkonflik sehingga permasalahan Laut China Selatan ini tidak hanya menjadi perebutan wilayah di antara negara sekitarnya yang berada secara geografis dekat dengan Laut China Selatan namun juga negara penuntut lainnya seperti Amerika Serikat yang hadir ditengah sengketa dan angkatan militer AS dikirim pada wilayah tersebut karena khawatir akan membatasi pergerakan yang dilakukan secara bebas dimana Laut China Selatan merupakan jalur penting dalam arus perdagangan antar negara karena wilayah Indo–Pasifik menjadi wilayah prioritas dalam cakupan global Amerika seperti yang diutarakan oleh Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Keamanan daerah Indo - Pasifik.

Sengketa wilayah ini menjadi permasalahan yang cukup serius mengingat beberapa negara pada khususnya Filipina pernah mengajukan tuntutan atas dasar wilayah perairan dan wilayah landasan kontinen serta zona ekonomi eksklusif terkait dengan kedekatan geografis terhadap klaim di Laut China Selatan khususnya pulau Spratly kepada pengadilan arbitrase di bawah kuasa Konvensi Hukum Laut PBB di tahun 1982 yang kemudian diratifikasi dan disetujui oleh 60 negara (Nainggolan, 2013, p. 8). Konflik sengketa wilayah ini terus berlanjut dengan setiap negara melayangkan ajuan gugatan kepada pengadilan internasional dan upaya – upaya lainnya dalam mengakomodasi berbagai keinginan serta tujuan dari berbagai pihak sehingga dilakukan negosiasi dan menghasilkan sebuah Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea atau DOC yang mana ini membuktikan bahwa Laut China Selatan merupakan wilayah strategis selain dari kekayaan sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu perairan yang sibuk dengan trans logistik dari berbagai negara sehingga hal tersebut meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di negara sekitarnya.

Negara China melancarkan banyak aksi strategis untuk mempertahankan dan menjaga stabilitas wilayah Laut China Selatan dengan melakukan kegiatan antara lain kegiatan latihan militer mandiri maupun yang dilakukan bersama dengan militer negara lain, serta melakukan upaya reklamasi di beberapa pulau daratan di sekitar wilayah sengketa. Negara-negara yang berkonflik telah melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan dan menghangatkan hubungan dengan negara lainnya dalam sengketa Laut China Selatan agar terjalin kerjasama harmonis dan juga dapat menguntungkan bagi peran sipil dan juga negara serta menjaga keamanan di dalamnya namun beberapa hal terjadi secara diam - diam termasuk dalam pengerahan dalam basis militer di sekitar wilayah yang dimana hal tersebut juga bisa memaksa pihak negara lainnya untuk mengambil tindakan menghindari atau melawan dari tindakan yang mengancam kedaulatan negara secara geopolitik. Penempatan posisi strategis militer di beberapa tempat dapat memicu kecemasan terkait adanya konflik berkelanjutan dan bersenjata yang dapat mempengaruhi kondisi keamanan nasional dari negara yang juga terdampak dan mengklaim wilayah di teritorial Laut China Selatan tersebut dengan jumlah armada dan kekuatan militer yang lebih kecil dibandingkan dengan negara besar lainnya.



Negara Amerika Serikat turut serta terlibat dalam konflik sengketa wilayah di Laut China Selatan bukan tanpa tujuan, melainkan untuk meningkatkan eksistensi negara yang mana akan sangat berpengaruh serta posisi wilayah laut ini yang geostrategis untuk menjalin interaksi secara global dalam jalur perdagangan yang aktif termasuk pada perdagangan minyak dunia sehingga faktor tersebut menjadi alasan utama bagi Amerika Serikat untuk dapat mempertahankan status bebas pada kawasan tersebut sehingga akan menghasilkan keuntungan serta meningkatkan jalinan kerjasama dan juga implikasinya terhadap hegemoni ke negara – negara lainnya, sehingga AS mengupayakan berbagai strategi untuk dapat menekan dan menandingi kekuatan China di wilayah tersebut serta mengawasi berbagai aktivitas pembangunan yang dijalankan oleh China. Apabila jika secara sah Negara China mengakuisisi wilayah menjadi bagian dari kedaulatan negaranya maka seluruh jalur dengan berbagai kepentingan harus melalui izin dari pihak berwenang dari China.indakan yang dilakukan oleh China dianggap sebagai pemicu instabilitas dan menimbulkan ketegangan serta kekhawatiran muncul konflik yang mana hal tersebut akan sangat berdampak terhadap berbagai aspek termasuk perekonomian secara global. Dengan dukungan dan keterlibatan dari negara di kawasan Asia Tenggara menjadikan Amerika Serikat banyak memiliki andil dalam urusan sengketa wilayah tersebut dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional maupun internasional.

Oleh karena kepentingan politik yang sangat krusial maka akses yang dijalankan agar Negara Amerika Serikat bisa secara langsung memantau adalah melalui Kebijakan FON (Freedom of Navigation) dimana dibuat konsep perjanjian bagi seluruh masyarakat internasional yang memiliki kepentingan dan jalinan hubungan luar negeri melewati jalur Laut China Selatan maka akan dapat secara bebas untuk dilewati yang memiliki dasar hukum internasional dan sebagaimana diatur dalam lembaga peradilan internasional dan kaitannya dengan hukum laut yang terkandung didalamnya upaya pencegahan dan penghapusan bagi segala tindakan yang dapat membahayakan manusia serta ditunjukkan sebagai penegakkan perdamaian, keadilan dan keamanan di wilayah atas laut.

Setiap dari negara memiliki kekuatan militer yang ditujukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional masing – masing negara, selain dari upaya preventif pencegahan konflik berlanjut akibat dari sengketa wilayah namun juga upaya ditujukan sebagai dasar menjunjung tinggi keselamatan wilayah, perlindungan negara dari berbagai ancaman yang dapat merusak stabilitas negara termasuk pada tindakan terorisme, perdagangan yang dianggap ilegal termasuk dalam perdagangan manusia dan penyelundupan serta hal-hal yang menyangkut kepada pencemaran identitas dan ideologi negara di wilayah maritim. Seluruh pihak dapat bekerjasama dengan baik dalam upaya menyelesaikan permasalahan mengenai sengketa melalui jalan multilateral. Adapun peran militer secara profesional yaitu menjunjung tinggi peran sebagai penjaga keamanan nasional sebagai garis utama terdepan perlindungan dan pertahanan strategis sebagaimana politik negara dijalankan sipil sebagaimana supremasi sipil itu diterapkan untuk melindungi berbagai pihak dan bukan sebagai pretorian.



SIMPULAN DAN SARAN

Dalam permasalahan yang dimiliki berbagai negara-negara dalam konflik di laut china selatan ini tidak lepas dari peran sipil dan juga militer yang masuk terhadap ranah negara-negara yang bersengketa dimana setiap aspek hubungan antara negara khususnya hubungan sipil dan militer menjadi penentu dimana suatu negara dapat menjadikan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi arah dari konflik yang terjadi di Laut China Selatan ini. Dengan banyaknya potensi alam yang berada dalam laut china selatan ini menjadi faktor utama bagi negara untuk menguasai Laut China Selatan dimana ada juga kepulauan Sparty yang strategis bagi jalur internasional.

Oleh karena itu suatu hubungan antar negara dengan masuknya militer dan juga sipil terhadap konflik tersebut menjadi hal yang inti dalam menyikapi konflik dimana hubungan sipil yang menjalankan pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan dan militer sebagai alat keamanan negara dibutuhkan untuk menghindari dan menyelesaikan konflik tersebut.

Dibutuhkannya suatu hukum internasional yang tetap dan kongkrit bagi semua negara termasuk china yang menggunakan klaim laut china selatan dengan *nine dash line* yang berbeda dengan negara lain dengan klaim yang dikeluarkan oleh UNCLOS pada tahun 1982, dimana hal ini harus didorong dengan kebijakan yang selaras dalam hubungan sipil dan militer agar tidak adanya konfrontasi antara militer negara lain dan juga menggunakan jalur diplomasi yang diperkuat dengan kekuatan sipil dalam mengontrol pemerintahan dan juga militer dalam pengawasan pertahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Budisantoso, H. (1999). Hubungan Sipil-Militer Yang Harmonis Dan Sinergik Dalam Negara Kesatuan R.I. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 4(2), 9-16. <https://doi.org/10.22146/jkn.11377>.
- Castro, R.C. (2015). The Impact of Strategic Balance in East Asia on a Small Power's Defense Policy: The Case of Philippines in the Face of South China Sea Dispute. In M. Hiebert, P. Nguyen, & G.B. Poling (eds.), *Examining the South China Sea Disputes* (pp. 1-23). London: Center for Strategic & International Studies, and Rowman & Littlefield.
- Citradi, T. (2020). *China Curi Ikan di Natuna, RI Impor 40 Persen Ikan Beku dari China*. Diakses dari CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108150226-4-128580/china-curi-ikan-di-natuna-ri-impor-40-ikan-beku-dari-china>.
- Costlow, M.R. (2012). *Gunboat Diplomacy in The South China Sea*. Colorado: United States Air Force Academy.
- Cronin, P.M. (2015). The Military Balance and Regional Order in the South China Sea. In M. Hiebert, P. Nguyen, & G.B. Poling (eds.), *Examining the South China Sea Disputes* (pp. 1-23). London: Center for Strategic & International Studies, and Rowman & Littlefield.
- Gibson, C.P., & Snider, D.M. (1999). Civil-Military Relations and the Potential to Influence: A Look at the National Security Decision-Making Process. *Armed Forces and Society*, 25(2), 193-218. <https://doi.org/10.1177/0095327X9902500202>.
- Glaser, B.S. (2015). China's Island Building in the Spratly Island: For What Purposes?. In M. Hiebert, P. Nguyen, & G.B. Poling (eds.), *Examining the South China Sea*



- Disputes* (pp. 1-23). London: Center for Strategic & International Studies, and Rowman & Littlefield.
- Harres, C. (2020, April). *Global Conflict Tracker*. Diakses dari www.cfr.org: <https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea>.
- Huntington, S. P. (1985). *The Soldier and The State*. London: The Belknap Press of Harvard University.
- Li, M. (2014). Mengelola Isu Keamanan di Laut China Selatan. *Kyoto Review of Southeast Asia*. Diakses dari <https://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-china-selatan-dari-doc-ke-coc/>
- Nainggolan, P.P. (2013). *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) DPR dan Azza Grafika.
- Noor, S. M. (2015). *Sengketa Laut China dan Kepulauan Kuril*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Perlmutter, A. 1984. *Militer dan Politik*. (Terj. oleh Drs. Sahat Simamora) , Jakarta: CV. Rajawali.
- Purwanto, A. J. (2010). Peningkatan Anggaran Militer China dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 7(1), 1-17.
- Rachman, M. (2018). Peranan China dan Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Konflik Laut China Selatan. Diakses dari https://www.academia.edu/4438120/Peranan_China_dan_Keterlibatan_Amerika_Serikat_Dalam_Konflik_Laut_China_Selatan
- Rosasians, F. (2013, Januari 29). *Diklaim China, Natuna Dikawal TNI*. Diakses dari Koran Tempo: <https://koran.tempo.co/read/nasional/299283/diklaim-China-natuna-dikawal-tni?>
- Rosenberg, D., & Chung, C. (2008). Maritime Security in the South China Sea: Coordinating Coastal and User State Priorities. *Ocean Development & International Law*, 39(1), 51-68. <https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/00908320701641602?scroll=top> HYPERLINK
"<https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/00908320701641602?scroll=top>&p&needAccess=true"& HYPERLINK
"<https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/00908320701641602?scroll=top>&p&needAccess=true"needAccess=true.
- Roza, R., Nainggolan, P. P., & Muhammad, S. V. (2013). *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) DPR.
- Saragih, H. M. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 8 (1), 48-63.
- Snyder, C. (2004). Maritime Security in the South China Sea. *Journal of Conflict Studies*, 24(1), 1-21.
- You, J. (2015). China's Civil-Military Strategies for South China Sea Dispute Control. *East Asian Policy*, 7(2), 78-89.